

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Judul “**Kekuasaan dalam Hubungan Internasional Kontemporer – Perspektif Foucault**” lahir dari penelusuran penulis akan karya-karya dan beberapa tulisan yang menguraikan gagasan Michel Foucault tentang kekuasaan. Selain memberikan pandangan tentang kekuasaan, pemikiran Foucault juga telah memberikan inspirasi bagi banyak ilmuwan HI yang beraliran Posmodernisme.

Pendekatan genealogi dan arkeologi yang sangat identik dengan perspektif Foucaultian juga sebenarnya sudah mulai nampak dalam pemikiran para ilmuwan HI kontemporer. Beberapa tokoh sentral dalam paradigma posmodern, seperti Richard Ashley, Rob Walker, dan James Der Derian, juga mulai mengaplikasikan metode tersebut dalam studi hubungan internasional yang mereka geluti.¹ Richard Ashley, salah satu pelopor dalam paradigma ini sebelumnya memang lebih dekat dengan gagasan-gagasan Habermas dan Mazhab Frankfurt. Akan tetapi, pada awal 1980-an ia telah meninggalkan ketertarikannya terhadap tokoh-tokoh tersebut. Setelah kurun waktu tersebut, Ashley justru lebih dipengaruhi oleh pemikir Perancis seperti Pierre Bourdieu dan Michel Foucault.²

¹ Richard Devetak, “Postmodernism” dalam Scott Burchill and Andrew Linklater, *Theories of International Relations* (Cambridge: Polity Press, 2002), Hal. 170.

Ketertarikan Ashley terhadap pemikiran Foucault nampaknya cukup beralasan. Dalam proses penelusuran terhadap gagasan Foucault, penulis juga telah menemukan adanya suatu gairah baru yang menjadi ruh dari seluruh gagasan Foucault. Cendekiawan Prancis ini nampaknya menjadi peretas jalan bagi lahirnya aliran filsafat Prancis kontemporer yang menyangkal berbagai sistem pemikiran besar. Sebelumnya, pemikir-pemikir Prancis sendiri memang telah banyak yang menjadi tokoh yang mendirikan pemikiran-pemikiran besar tersebut. Didalam alur gagasan mereka dapat ditemukan hukum sejarah, ide tentang suatu kemajuan hingga harapan akan terciptanya tatanan masyarakat yang cemerlang. Filsuf-filsuf besar semacam Montaigne, Pascal dan Rosseau – seperti halnya Hegel di Jerman – adalah beberapa tokoh yang identik dengan gagasan diatas.³

Ketika realitas dunia internasional kontemporer tidak lagi mencerminkan isi gagasan mereka, beberapa filsuf memilih untuk tidak tenggelam dalam irama pemikiran yang demikian menggelombang tersebut. Foucault adalah tipikal pemikir kontemporer yang mencoba memulai era baru dalam pemikiran Prancis. Era baru yang oleh Jean Luis Chevreau disebut sebagai era pemikiran kompleks dimana para pemikirnya berhasil menjembatani himpunan-himpunan yang pada masa lalu tidak saling berkaitan, antara teks ilmiah dan teks sastra.

Foucault sama halnya dengan Nietzsche, tidak tertarik dan tidak berminat untuk memberikan gagasan-gagasan besar dalam karya-karyanya.

³ Lihat Jean Luis Chevreau, dalam Michel Foucault, *Seks dan Kebiasaan*, (PT. Gramedia Pustaka

Alih-alih mengemukakan ide-ide besar seperti Hegel, Marx maupun Adam Smith, Foucault justru lebih tertarik untuk menelaah tema-tema pinggiran seperti seks dan kegilaan, yang tidak pernah terpikirkan sama sekali oleh para ekonom, sejarawan maupun filsuf kontemporer. Disinilah kita menemukan orisinalitas yang menjiwai pemikirannya.

Berangkat dari orisinalitas pemikirannya tersebutlah, Foucault akhirnya justru menemukan jati diri filsafat yang baru. Ialah yang memulai tradisi filsafat kontemporer yang sama sekali sudah bergeser dari tradisi konvensional sebagai suatu ilmu yang bertugas mencari kebenaran. Selebihnya, ia juga telah menjauhkan dirinya dari kebiasaan pemikir-pemikir terdahulu semacam Marx untuk “terlibat” (*Engage*) dalam alur perubahan/gerakan tertentu.

Foucault adalah seorang pemikir dengan gagasan yang teramat sangat kompleks. Akan tetapi, dengan penelaahan yang terperinci atas karya-karyanya, kita akan menemukan sisi kecemerlangan pemikirannya yang membuatnya dikenal sebagai salah satu pemikir garda terdepan dalam dunia pengetahuan kontemporer. Melalui penelusuran penulis akan beberapa karyanya, akhirnya penulis menemukan suatu garis penghubung antara fokus kajian Foucault dengan fenomena-fenomena yang muncul dalam interaksi antar aktor-aktor internasional yang merupakan objek study dari disiplin SHI.

Dalam salah satu karya monumentalnya, *Discipline and Punish* penulis melihat bagaimana Foucault dengan sangat cemerlang menggambarkan berubahnya pola operasionalisasi kekuasaan dalam masyarakat modern

Meskipun fokus analisa dalam buku tersebut lebih diarahkan pada tubuh individu modern sebagai objek, penulis merasakan bahwa sekelumit kesimpulan akhir yang ditorehkan dalam *Discipline and Punish* memiliki relevansi yang cukup mendalam untuk dipakai sebagai penjelas atas bagaimana kekuasaan beroperasi dalam dunia Internasional. Jika Foucault menelaah pembentukan disiplin, pergeseran metode penaklukan dan pola penguasaan dalam masyarakat modern, maka skripsi ini – dengan menggunakan gagasan-gagasan dalam *Discipline and Punish* dan beberapa karya lain dari Foucault yang berbicara tentang kekuasaan – akan mencoba untuk mendeskripsikan bagaimana aktor-aktor dalam Politik Internasional ‘terjebak’ dalam suatu konteks keadaan yang sama (Adanya pergeseran pola penaklukan dan karakteristik kekuasaan, pembentukan disiplin dan hukuman) dalam dunia internasional kontemporer.

Dalam usaha untuk mempelajari gagasan Foucault penulis menyadari bahwa pokok-pokok pemikiran Foucault ternyata sangatlah rumit untuk diuraikan dalam suatu kajian yang singkat ini. Membaca karya-karya dan menginterpretasikan pemikiran Foucault dalam suatu tafsiran yang ringkas tentunya akan sangat pelik, apalagi jika dilakukan oleh penulis yang notabene adalah pembaca amatir.

Kesulitan lain yang penulis hadapi adalah wilayah kajian Foucault yang berada cukup jauh dari fokus kajian dalam disiplin SHI. Dengan permasalahan tersebut, penulis dipaksa untuk memilah-milah gagasan Foucault yang cukup relevan untuk dikontekstualisasikan kedalam wilayah

SHI. Akan tetapi, penulis akhirnya menemukan kemudahan terutama setelah menggerogoti 2 karya terakhir dari Foucault ; *Discipline and Punish* dan *The History of Sexuality* (yang telah diterjemahkan Rahayu S Hidayat kedalam bahasa Indonesia) yang cukup banyak mengulas tentang konsepsi kekuasaan. Konsepsi kekuasaan dalam 2 karyanya tersebut, meskipun ditelaah Foucault dengan jalinan pendekatan Filsafat, Psikologi, Sejarah yang njlimet, akan tetapi, mampu melahirkan beberapa hakikat dan kesimpulan yang jika diibumikan kedalam ranah disiplin SHI, memiliki tingkat relevansi yang tinggi.

Singkatnya, dengan memilih judul ini, penulis hanya berharap untuk mendapatkan sudut pandang dan sikap baru dalam menelaah dan terutama memahami konsep kekuasaan.

B. Latar Belakang Masalah

Kondisi Studi Hubungan Internasional Kontemporer

Jika diukur melalui indikator status akademis yang telah dicapainya, Study Hubungan Internasional telah mencapai suatu taraf yang layak untuk disebut sebagai suatu disiplin. Hubungan Internasional sendiri sebagai sebuah disiplin ilmu telah dipenuhi oleh berbagai macam wacana yang berkembang di dalamnya. Seperti yang dielaborasi oleh Thomas Kuhn, tahap paradigmatic yang telah dicapai oleh SHI tersebut tentunya akan relevan dengan terbentuknya *normal science*, suatu keadaan dimana salah satu paradigma dengan metodologi yang diakui akan mendominasi disiplin ilmu tersebut.

Pada tahapan ini, menurut Kuhn sudah tidak ada lagi perbedaan pendapat yang

mendasar diantara para ilmuwan dalam disiplin ilmu tersebut.⁴ Dominasi tersebut telah berimplikasi pada terjadinya proses standarisasi atas aspek-aspek epistemologi, metodologi dan ontologi dari SHI.⁵ Situasi inilah yang kemudian memicu munculnya suara-suara yang mengkritisi status Ilmu Hubungan Internasional dewasa ini.⁶

Dominasi pemikiran-pemikiran tertentu memang sangat nyata, terutama apabila kita memperhatikan pendapat para ilmuwan bahwa dalam sejarah perkembangan disiplin SHI mulai dari awal kelahirannya hingga saat ini, disiplin SHI telah diwarnai oleh setidaknya tiga perdebatan besar yang merupakan perdebatan diantara pendekatan-pendekatan utama dalam hubungan internasional.

Masa lalu dari SHI memang terbentuk dan sekaligus ditentukan oleh adanya perdebatan-perdebatan yang ada diantara dua perspektif yang bertentangan dalam aspek-aspek pandangannya. Perdebatan pertama adalah antara kaum idealis berhadapan dengan realisme. Idealisme, sebagai sebuah paradigma klasik, adalah sebuah paradigma yang sangat mendominasi dan sangat berperan penting dalam kelahiran SHI. Masa setelah perang dunia pertama memunculkan pertanyaan – pertanyaan besar bagi ilmuwan politik yang mempelajari hubungan-hubungan lintas batas negara/antar negara.

Ilmuwan-ilmuwan Eropa saat itu dengan sangat cermat mempertanyakan sebab musabab dari terjadinya perang yang sedemikian

⁴ Lihat Muhtar Mas' oed, "*Ilmu Hubungan Internasional - Disiplin dan Metodologi*". Hal. 9

⁵ Rizal Sukma, *Hubungan Internasional dekade 1990-an: Hegemoni, Dekonstruksi, dan Agenda*" Hal 6 dalam Jurnal Ilmu Politik.

⁶ Beberapa Kritik terhadap kondisi Ilmu Hubungan Internasional akan dibahas pada bab lain.

hebat dapat terjadi diantara Inggris, Perancis, Jerman, Austria, Turki dan kekuatan-kekuatan lainnya. Pertanyaan lainnya adalah benarkah perang dunia tersebut adalah bentuk aktual/kongkrit dari naluri kebinatangan aktor-aktor internasional? Pertanyaan tersebut akhirnya menggugah para ilmuwan dan pemikir untuk merumuskan postulat pemikiran yang dapat menjawab tuntas semua pertanyaan tersebut.

Idealisme maju paling pertama untuk memberikan jawaban yang mutlak. Bagi kaum idealis, manusia pada dasarnya bersifat rasional, lebih memilih sebuah iklim yang harmonis. Perang hanyalah bentuk ketidakmampuan manusia (dalam hal ini tokoh-tokoh pengambil kebijakan dalam negara-negara tersebut) untuk mengambil sikap berdasarkan kalkulasi rasional. Saran yang diberikan kaum idealis adalah menegakkan Hukum-hukum internasional dan mendirikan Liga Bangsa-Bangsa.

Gagasan diatas mendapatkan tentangan dari kaum realis. Realisme adalah paradigma yang postulat-postulatnya sangat berkaitan dengan kekuasaan. Bagi realisme, penegakan hukum internasional ataupun pendirian Liga Bangsa-Bangsa adalah sia-sia. Manusia digerakkan oleh naluri dasar untuk mencari kekuasaan (*Struggle for Power*). Segala upaya untuk menghindarkan manusia ataupun negara-negara untuk bertindak berdasarkan naluri dasar tersebut sama saja dengan buang-buang tenaga. Realisme malah lebih menganggap bahwa sebenarnya (atau seharusnya) kepentingan-kepentingan dari negara-negara yang terlibat dalam perebutan kekuasaan

justru akan mengarah pada terjadinya perimbangan kekuasaan. Perimbangan kekuasaan itulah yang memungkinkan terciptanya stabilitas.

Perdebatan kedua adalah perdebatan metodologis antara realisme (tradisional) dengan behavioralisme. Karena perdebatan ini lebih terarah pada perdebatan metodologis, maka kontribusinya pada konsep kekuasaan adalah pada bagaimana metodologi yang tepat untuk memahami kekuasaan. Melalui metode tradisional seperti halnya kaum realis, atau melalui kuantifikasi dan penghitungan secara cermat mengenai atribut-atribut kekuasaan?

Mengenai perdebatan ketiga, penulis lebih memilih untuk berpandangan bahwa perdebatan ini sebenarnya adalah kemunculan kembali paradigma realis dan liberal-klasik (idealis) dalam format baru yang sudah termodifikasi. Realisme telah diperbaharui dengan kemunculan neorealisme R. Gilpin ataupun Kenneth Waltz. Sebaliknya, kaum idealis/liberal klasik telah digantikan oleh kaum neoliberal. Titik perdebatan mereka yang terkait dengan kekuasaan adalah mengenai porsi kekuasaan yang dimiliki oleh aktor-aktor dalam hubungan internasional ditengah gerak maju perkembangan zaman. Kaum liberal kontemporer beranggapan bahwa kekuasaan negara telah dilucuti dengan semakin terbukanya perdagangan internasional dan kemunculan aktor-aktor baru dalam hubungan internasional. Sebaliknya, kaum neorealis masih bersiteguh menganggap negara masih memiliki kekuasaan dalam interaksi pada skala internasional.

Meskipun tetap berada dalam dominasi paradigma-paradigma yang diulas diatas disiplin SHI telah diperkaya oleh masuknya paradigma lain

kedalam ranah perdebatan dari disiplin ilmu ini. Ditengah dominasi paradigma realis dalam khazanah SHI saat ini, berkembanglah suatu kritik yang sekaligus memajukan suatu wacana dan alternatif pemikiran baru dalam SHI. Beberapa kritik yang diajukan oleh wacana baru tersebut terangkum dalam suatu pendekatan baru yang dikenal dengan istilah pasca-positivisme. Salah satu kritik yang dicetuskan oleh pasca-positivisme terhadap SHI antara lain adalah kritik terhadap pemahaman dan fondasi ilmu pengetahuan yang berlaku dalam SHI dan kritik "Politik Keilmuan" terhadap sifat otoriter dan represif SHI akibat batas-batas akademik konvensional yang digariskan secara *arbitrary*.⁷

Berangkat dari beberapa kritik pasca-positivisme tersebut, dalam agenda SHI kemudian mulai tumbuh dalam lingkupan wacana pasca-positivisme tersebut. Pasca-positivisme sendiri menurut Rizal Sukma merupakan rangkaian paradigma/perspektif yang memiliki perbedaan agenda namun kesemuanya memiliki kesamaan dalam penolakannya terhadap dominasi positivisme dalam metode SHI kontemporer.

Sebagai salah satu perspektif yang berkembang dalam SHI, postmodernisme juga memiliki landasan gagasan yang menandainya. Postmodernisme dalam SHI juga mendasarkan analisis mereka pada pemikiran-pemikiran Jean Francis Lyotard, Jacques Derrida, Roland Barthes dan tentunya Michel Foucault. Nama terakhir merupakan seorang pemikir postmodern yang terkenal dengan gagasan-gagasannya yang sangat orisinal

Analisis kaum Postmodernis ditujukan untuk membedah pengetahuan tentang HI yang kita miliki sekarang melalui praktek-praktek dimasa lalu, menemukan sisi-sisi pinggir (*margins*) teori politik. Sifat analisa yang demikian diharapkan dapat menghasilkan kepekaan bagi SHI untuk dapat mengendapkan wacana-wacana lokal yang tergerus oleh diskursus-diskursus dominan. Para pemikir postmodernisme dengan berbagai metode dan pendekatannya (arkeologi, genealogi, dekonstruksi, intertekstualisme) selalu mencoba untuk menelanjangi konsep-konsep dan klaim-klaim kaum rasionalis dan terutama universalis tentang “kebenaran alamiah”. Foucault misalnya, adalah salah seorang tokoh postmodern yang membangun gagasan serupa. Dalam *Madness and Civilization*, ia mengungkapkan bahwa dunia barat :

“...diwajibkan untuk menata diri sendiri dengan bahasa-bahasanya sendiri, dipaksa mengemban tugas untuk menyandarkan dan memperbaiki, dan merestorasi rasio *dari* irasionalitas ini *menuju* irasionalitas lainnya”.⁸

Bagi Foucault, refleksi atas rasionalitas manusia menjadi hal yang urgen karena adanya klaim atas kebenaran selalu menyimpan potensi ideologis yang menyertainya.

Perubahan situasi internasional setelah berakhirnya perang dingin pada akhir dekade 80-an memberikan dampak luar biasa dalam SHI. Perubahan besar tersebut juga diindikasikan oleh munculnya paradigma-paradigma baru yang menginterpretasikan power/kekuasaan dalam pemaknaan yang lain.

Kutipan berikut setidaknya dapat menjelaskan terjainya pergeseran tersebut :

“The postwar era has witnessed radical transformation in the elements, the uses, and the achievements of power. And Hans Morgenthau, author of the

leading realist text on international politics went so far in his reaction to the events of the early 1970s as to announce an historically unprecedented severing of the functional relationship between political, military, and economic power...

(Era pasca-perang telah menjadi saksi atas terjadinya transformasi yang radikal atas elemen, kegunaan, dan kepemilikan dari kekuasaan. Morgenthau, yang merupakan penulis dari teks utama aliran realisme dalam politik internasional memberikan reaksi terhadap beberapa kejadian pada awal 1970-an dengan mengungkapkannya sebagai sesuatu yang dahsyat, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, dimana terdapat hubungan fungsional antara politik, militer, dan kekuasaan ekonomi...)⁹

Seperti yang diungkapkan oleh Baldwin, perdebatan tentang power yang berlangsung pasca perang dingin adalah perbedatan antara kaum realis dan neoliberalis.¹⁰ Kubu realisme masih bertahan terhadap pandangan negara sebagai institusi yang berkewenangan/otoritas dalam hubungan internasional sehingga menempatkan negara masih sebagai aktor utama. Sebaliknya, kaum neoliberal menyangsikan relevansi dari kekuasaan negara dalam era globalisasi ini. Kenichi Ohmae, dalam *The end of Nation State* telah mengisyaratkan bahwa negara telah kehilangan kekuasaannya dalam mengendalikan ekonomi domestik sekalipun. Selain itu, kaum globalis juga menganggap berkembangnya institusi-institusi yang mengintegrasikan negara-negara dalam sekup regional (seperti Uni Eropa) sebagai cikal bakal dari suatu rezim ekonomi global yang berada diluar wilayah kekuasaan/otoritas negara.

Akan tetapi, perdebatan diantara kedua kubu tersebut meskipun berbeda pendapat dalam menafsirkan kapabilitas dan tingkat kekuasaan antara aktor-aktor baik state-aktor maupun non-state aktor namun masih saja

⁹ Ibid, hal 11.

¹⁰ David A. Baldwin, "Neoliberalism, Neorealism and World Politics", dalam David A. Baldwin (Ed), "Neoliberalism and Neoliberalism: The Contemporary Debate" (Columbia University Press :

memiliki kesamaan dalam memandang kekuasaan sebagai sebuah atribut yang dapat dimiliki oleh suatu aktor. Dengan kata lain, kedua kubu, baik realis maupun neoliberalis tetap berada pada suatu pandangan yang identik dalam memahami kekuasaan. Perbedaan mereka hanya terletak pada porsi kekuasaan yang dimiliki oleh aktor-aktor yang muncul setelah perang dingin berakhir.

Uraian singkat mengenai kondisi SHI diatas telah memberikan uraian mengenai status SHI, gambaran beberapa Paradigma yang ada didalamnya, konsep kekuasaan dari beberapa paradigma dan sekilas perdebatan tentang kekuasaan. Selanjutnya, untuk mengetengahkan konsepsi kekuasaan dan kritik metodologi Foucault, maka terlebih dulu harus dilihat konteks pemikiran Foucault yang relevan dengan disiplin SHI.

Relevansi Pemikiran Foucault dalam SHI

Menggali relevansi pemikiran Foucault tentunya akan memaksa kita untuk melakukan klasifikasi (Penmpatan) Foucault dalam suatu disiplin ilmu tertentu. Hal ini sebenarnya bermasalah karena Foucault sendiri adalah sosok pemikir dengan kompleksitas gagasan yang sangat rumit. Dreyfus dan Rabinow, duet komentator Foucault yang bukunya menjadi rujukan kebanyakan tafsir atas Foucault pada akhirnya dipaksa untuk melakukan revisi bukunya sendiri disebabkan oleh penolakan Foucault atas julukan Poststrukturalis yang dilekatkan padanya.¹¹

¹¹ Dreyfus dan Rabinow, penulis buku mengenai pemikiran Foucault semula menduga Foucault adalah seorang penganut Strukturalisme – yang di tahun enam puluhan sedang laku dan banyak dianut – yang kemudian mengalihkan perhatiannya pada Hermeneutika. Berdasarkan pertimbangan tersebut, mereka memberi judul buku mereka, “*Michel Foucault, From*

Kerumitan semakin bertambah jika seorang penulis awam seperti saya mencoba untuk 'menyeret' pemikiran Foucault ke sebuah disiplin ilmu yang bernama Hubungan Internasional. Dimanakah relevansinya? Pertanyaan yang menggugah tersebut terjawab setelah penulis 'meraba' gagasan-gagasan yang dituangkannya dalam salah satu karya monumentalnya yang terakhir yaitu *Discipline and Punish*, ditambah juga dengan membaca *The History of Sexuality*. Oleh kebanyakan penulis, dua karya terakhir dari Foucault itu disebut-sebut sebagai awal babakan baru dari refleksi Foucault atas kekuasaan. Mengenai hal tersebut, Donny Gahril Adian menyatakan :

"Bukan hanya kuasa yang menggelisahkan Foucault. Seks juga menggundahkannya. Setelah habis-habisan meneliti sejarah kegilaan, klinik dan penghukuman, Foucault mulai tertarik pada seks-sejarah dan persisnya. Penelitiannya terhadap sejarah seks menghasilkan tiga jilid seri *The History of Sexuality* yakni *The Will of Knowledge*, *The use of Pleasure*, dan *The care of Self*.

Foucault melalui penelitiannya bernafsu untuk merumuskan sebuah konsep kuasa baru. Sebuah konsep kuasa yang bahkan berbeda dengan apa yang ia adopsi sebelumnya.Foucault tidak lagi mempersoalkan bagaimana orang membelenggu orang lain, melainkan bagaimana orang membelenggu dirinya sendiri."¹²

Jika demikian, lalu bagaimanakah relevansi konsep kuasa baru Foucault tersebut dalam menganalisa fenomena yang ada dalam SHI? Pertanyaan ini akan membenturkan kita pada realitas dunia Internasional dimana kekuasaan sebagai sistem relasi yang menghubungkan aktor-aktor politik internasional ternyata juga telah mengalami pergeseran yang drastis.

Structuralism to Hermeneutics". Namun pada akhirnya penilaian ini terpaksa mereka ralat karena kebanyakan ahli, dan juga Foucault sendiri menolak pandangan yang demikian. Karena itu, mereka kemudian mengubah judul buku mereka menjadi "*Michel Foucault beyond Structuralism and Hermeneutics*"

¹² Donny Gahril Adian, "Menabur Kuasa Menuai Wacana", dalam Basis No. 01-02 Tahun ke 51, Januari - Februari 2002, Hal.43.

kuno, seiring dengan kemajuan teknologi ternyata semakin ditinggalkan, digantikan dengan pola penundukan yang lebih bersifat ideologis melalui penguasaan sistem informasi, pengetahuan dll.

Sekali lagi, Perang dingin merupakan bentuk perang terakhir yang pada dasarnya sarat dengan pergeseran relasi kuasa, namun mempertontonkan konflik fisik dalam skala yang sangat minim. Jika dalam *Discipline and Punish* Foucault menemukan pertarungan skala mikro (dalam tubuh individu yang terhukum). Dalam SHI, kita akan menemukan negara sebagai salah satu aktor ternyata juga memiliki konflik internal yang membuat negara akhirnya terposisikan sebagai objek dari sebuah mekanisme disiplin internasional yang oleh Foucault dikatakan bersifat 'menormalisasikan'.

C. Pokok Permasalahan

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan pada bagian latar belakang masalah, penulis menyimpulkan bahwa, pokok permasalahan yang akan menjadi fokus dalam kajian lebih lanjut dari skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah konsep Foucault mengenai kekuasaan dalam hubungan internasional kontemorer dan kritiknya terhadap kekuasaan konvensional?

Berdasarkan perumusan dua masalah diatas, penulis akan mencoba untuk menguraikannya dalam bagian selanjutnya dari skripsi ini.

D. Batasan Permasalahan

Tulisan ini akan dibatasi berdasarkan hal-hal berikut yaitu :

1. Menganalisa serba-serbi kekuasaan dalam pemikiran Foucault, dan Kontekstualisasinya dalam menganalisa fenomena dunia internasional kontemporer.
2. Pemahaman kekuasaan yang digunakan bukan hanya sebagai sesuatu yang bergerak dalam ruang individu, akan tetapi, lebih jauh lagi beroperasi juga dalam ruang sistem politik internasional. Pembentukan sistem panoptikon dalam dunia internasional adalah bentuk dari perluasan pengaruh kekuasaan.

E. Kerangka Teori

Adapun teori yang akan digunakan untuk mengelaborasi segi-segi kekuasaan dalam tulisan ini adalah :

Kekuasaan

Kekuasaan, dalam Kamus Hubungan Internasional diartikan sebagai Perangkat (Means) yang dipergunakan dan juga Tujuan (Goals) yang hendak diraih oleh setiap negara dalam perjanjian politik, ekonomi, dan sosial. Pelaksanaannya dilakukan melalui berbagai bentuk meliputi persuasi, perang psikologis dan ideologi, tekanan ekonomi, imperialisme kebudayaan, perang

terbatas yang terkendali dan diakui secara sah oleh masyarakat internasional, dan terakhir adalah perang.¹⁴

Walter S. Jones mendefinisikan kekuasaan dalam arti yang paling luas sebagai "Kemampuan suatu Aktor dalam panggung Internasional untuk menggunakan segenap sumber daya yang berwujud maupun tidak untuk mempengaruhi peristiwa-peristiwa internasional agar membawa hasil yang memuaskannya."¹⁵ Masih senada dengan definisi tersebut, Definisi lain, yang mengkorelasikan kekuasaan dengan tujuan (Goal) dari seorang aktor dikemukakan oleh Joseph S. Nye, Jr. Menurutnya, Kekuasaan adalah kemampuan seorang aktor untuk mencapai tujuannya.¹⁶ Selain itu, Nye juga memperkenalkan kekuasaan lunak (soft power) yang menurutnya merupakan bentuk kekuasaan kontemporer.

Arkeologi – Genealogi

Pemahaman terhadap konsep Arkeologi Pengetahuan Foucault memiliki perbedaan dengan konsep Arkeologi maupun konsep Pengetahuan pada umumnya. Arkeologi, biasanya dimengerti sebagai suatu ilmu purbakala tentang benda-benda. Foucault mengambil hakikat dari makna *Arche* yaitu asal-usul tertentu. Dengan demikian, kita dapat sedikit menyederhanakan pengertian *Arkeologi* dalam konsepsi Foucault yaitu sebagai suatu metode untuk mencari asal usul dari pengetahuan. Pengetahuan sendiri jika diartikan

¹⁴ Jack C. Plano dan Roy Olton, "Kamus Hubungan Internasional" (Terj) (Penerbit Putra A Bardin - 1999) Hal. 14

¹⁵ Walter S. Jones, "Logika Hubungan Internasional 2 – Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional dan Tatanan Dunia", (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 1993), Hal. 3

¹⁶ Joseph S. Nye, Jr. "Memimpin Dunia – Sifat Kekuatan Amerika yang Berubah", (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta : 1992) Hal. 25

dalam bahasa Prancis memiliki kedekatan makna dengan *Connaissance* yang berarti suatu disiplin ilmu tertentu seperti Psikologi, Psikiatri, Filologi, Biologi, Ekonomi dan disiplin ilmu lainnya. Pengetahuan juga memiliki kedekatan makna dengan kata *Savoir* yang berarti landasan bagi disiplin ilmu tertentu.

Dalam usaha arkeologisnya, Foucault mengadakan studi tentang periode-periode sejarah pemikiran. dalam studi itu Foucault berusaha menemukan *episteme* yang mendasari disiplin ilmu tertentu dan ciri pengetahuan yang menentukan bagi setiap periode (yang oleh Foucault disebut abad). *Episteme* adalah pengandaian-pengandaian tertentu, prinsip-prinsip tertentu, apriori historis. Menurutnya, *episteme* itu mempunyai suatu struktur. Maka, Foucault menyamakan *episteme* dengan sistem pemikiran. Inilah yang menjadi landasan epistemologis setiap zaman. Dapat dikatakan bahwa arkeologi pengetahuan tidak lain adalah usaha Foucault untuk menemukan *episteme* atau sistem pemikiran dalam setiap periode sejarah atau zaman.¹⁷

Melalui arkeologi pengetahuan, Foucault misalnya telah berhasil menemukan bagaimana suatu wacana justru berkecambah dalam masyarakat, justru ketika kekuasaan mencoba untuk mengerangkeng wacana tersebut.

Dalam *La Volonté de Savoir*, ia menyatakan :

Hanya kebutuhan tertentu dan khas – keadaan ekonomi yang mendesak, kegunaan politis – yang berhasil menanggalkan tabu itu dan membuka beberapa pintu bagi wacana tentang seks, namun tetap secara

¹⁷ Hadi Susilo, "Tempat Manusia dalam Arkeologi Pengetahuan Foucault", dalam Tim Redaksi Driyarkara, *Hakikat Pengetahuan dan Cara Kerja Ilmu-Ilmu*, (PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1993). Hal. 78.

terbatas dan terbakukan dengan ketat. Begitu banyak pembicaraan tentang seks dan begitu banyak mekanisme yang mendorong seks untuk dibicarakan namun dengan syarat yang ketat. Bukankah hal itu membuktikan bahwa seks merupakan rahasia dan orang masih berusaha untuk mempertahankan keadaan itu? Kita justru harus mempertanyakan tema yang demikian sering muncul, bahwa seks berada diluar wacana dan bahwa hanya jika suatu hambatan dihilangkan, dan suatu rahasia dibongkar, maka akan terbuka jalan menuju seks. Bukankah tema itu justru menjadi bagian dari anjuran untuk merangsang pembentukan wacana?¹⁸

Metode lain yang dipergunakan Foucault adalah Genealogi. Jika dalam arkeologi, Foucault menemukan episteme (paradigma) sebagai kawah candradimuka yang mereproduksi pengetahuan manusia, metode Genealogi Foucault membuka mata kita akan relasi kekuasaan dan pengetahuan yang saling berkelindan dan menggerakkan pemikiran manusia. Dengan demikian, metode Genealogi memiliki cakupan lebih luas. Genealogi Foucault bukanlah suatu metode yang akan menggiring kita menemukan akar dari epistemologi ilmu-ilmu yang mapan/istimewa. Genealogi menyeret kita untuk menemukan relasi kekuasaan yang bermain dan menjadi penegak atas pengetahuan manusia.

Menurut Dreyfus dan Rabinow, dalam karya-karyanya setelah tahun 1970-an, Foucault mebalikkan prioritas metodologinya. Sebelum 1970-an metode arkeologi nampak lebih menonjol. Hal ini mengakibatkan timbulnya kesan bahwa Foucault adalah seorang pemikir poststrukturalis.

Setelah 1970-an, Foucault membalikkan prioritas metodologisnya. Ia menjadi semakin getol dengan penyelidikan kekuasaan sehingga akhirnya lebih mengedepankan genealogi daripada arkeologi. Dari rahim genealogilah

¹⁸ Michel Foucault, "Sejarah Seksualitas : Seks dan Kekuasaan", (PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1997) Hal. 39.

Foucault melahirkan beberapa aturan pokok untuk study tentang kuasa. Salah satu aturan itu adalah jangan study tentang kuasa hanya mengidentifikasi kuasa dalam pengertian dan sifat-sifat larangan maupun represi, melainkan mempertimbangkan juga efek positifnya.

Metode genealogi dan arkeologi bukanlah dua metode yang kontradiktif. Keduanya adalah metode yang oleh Foucault dikatakan bersifat saling melengkapi. Arkeologi berusaha untuk menyendirikan tingkat praktek-praktek diskursif untuk merumuskan aturan-aturan produksi dan transformasi bagi aktifitas dalam membangun ilmu pengetahuan. Di lain pihak, Genealogi berusaha untuk memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan dan relasi-relasi kuasa. Akan tetapi, genealogi bukanlah sebuah metode yang memisahkan aturan untuk produksi diskursus tersebut dengan relasi kuasa. Genealogi justru mencoba merumuskan jejalinan yang maha rumit dari keduanya. Pada titik inilah kita menemukan bagaimana genealogi dan arkeologi bersifat saling melengkapi.

Gagasan yang dikemukakan Foucault diatas masih menyisakan sederet rumusan lain yang juga tak kalah pentingnya. Akan tetapi, secara sederhana dapat dipahami bahwa, penemuan Foucault diatas membuktikan bahwa adanya reproduksi wacana dalam masyarakat justru dirangsang oleh lembaga-lembaga dan kekuasaan yang tersebar dalam masyarakat.

Lalu bagaimanakah relevansi teori Arkeologi Pengetahuan tersebut dalam memahami konsep kekuasaan? Dari penelusuran melalui teori itu, kita akan mendapatkan gambaran karakteristik kekuasaan berdasarkan

pemahaman Foucault. Meskipun gambaran kekuasaan *ala* Foucault tidak diberikan secara rinci/baku, akan tetapi beberapa penyederhanaan terhadap konsep-konsep yang diperkenalkannya cukup banyak diulas oleh para penulis sehingga akan lebih mudah untuk disimpulkan.

Disiplin dan Hukuman

Disiplin dan Hukuman adalah dua hal yang dalam masyarakat modern mengalami pergeseran bentuk dan aktualisasinya. Oleh Foucault, metode Hukuman digambarkan bergerak menjadi sebuah proses koreksi yang membentuk sikap yang wajar dan pro sosial – dalam artian sesuai dan bermanfaat bagi nilai-nilai serta tatanan baku dalam masyarakat. Disiplin adalah karakter khas yang ingin dilahirkan dalam tubuh individu modern. Melalui pelbagai sarana pendisiplinan seperti penjara maupun barak militer disiplin dibentuk dan ditanamkan dalam tubuh individu.

Dalam konteks dunia internasional, aktor aktor yang terlibat dalam politik internasionallah yang akhirnya menjadi objek pendisiplinan dan penghukuman. Bentuk dan sifat pendisiplinan dan penghukuman dalam dunia internasional juga sudah sangat berbeda. Pendisiplinan dan Penghukuman dalam metode kuno adalah melalui perang, pembunuhan dan penyiksaan. Akan tetapi, pendisiplinan dan penghukuman yang tampak saat ini adalah melalui suatu teknologi kompleks yang meliputi aktifitas mulai dari perundingan dan perjanjian sampai dengan pemantauan aktifitas nuklir maupun investasi melalui intelijen atau penelitian

Panoptisisme

Sebenarnya Panoptisme adalah sebuah konsep kunci dari Foucault untuk menjelaskan bagaimana sebuah teknologi pendisiplinan berjalan. Gagasan awal Panoptisisme Foucault diadopsinya dari rancangan arsitektural penjara yang dibuat oleh Jeremy Bentham.¹⁹ Penjara Panoptikon, yang menjadi sarana/teknologi untuk membentuk disiplin, merupakan model penjara yang dirancang sedemikian rupa sehingga individu yang menjadi objek teknologi tersebut selalu merasa berada dalam pengawasan secara terus menerus. Perasaan diawasi secara kontinyu tersebutlah yang ditambah dengan pengisolasian individu akan menimbulkan konflik dalam 'jiwa' individu tersebut. Melalui konflik tersebutlah akan lahir individu yang lebih patuh terhadap sistem.

Menurut penulis, sistem internasional yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, terutama sejak semakin diandalkannya pencitraan satelit sebagai teknologi yang mampu mengontrol aktifitas negara, adalah bentuk aktual sistem panoptikon dalam dunia internasional. Perbedaannya, dalam sistem panotikon internasional, negara dan aktor – aktor lemahlah yang menjadi objek dari sistem ini.

¹⁹ Pemahaman terhadap Operasionalisasi dan Fungsi penjara Panoptikon ala J.Bentham akan lebih mudah didapatkan dengan melihat gambar model penjara tersebut. Gambar tersebut dapat dilihat dalam *Summitter et Benth (Discipline and Punish)*. Dapat diakses melalui link berikut: [http://www.oxfordjournals.org/](#)

F. Hipotesa

Beberapa Hipotesa, atau kesimpulan awal yang hendak dijabarkan oleh penulis melalui skripsi ini adalah :

1. Menurut Foucault, telah terjadi 'pergeseran kekuasaan'. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran dari kekuasaan yang represif ke arah kekuasaan yang menormalisasi. Dalam dunia Internasional kontemporer, pola operasionalisasi kekuasaan juga telah bergeser dari bentuk yang represif ke bentuk yang menormalisasi.
2. Foucault mengkritisi pandangan yang menganggap kekuasaan sebagai sebuah atribut yang tidak dapat berdiri sendiri. Kekuasaan selalu dihubungkan dengan aktor-aktor tertentu dalam hubungan internasional. Paradigma Realis dan liberal adalah contoh paradigma yang memiliki pandangan semacam itu.

Beberapa Hipotesa tersebut, dengan menggunakan perangkat teori yang terdapat dalam beberapa karya Foucault, akan penulis coba untuk jabarkan secara lebih terperinci.

G. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui penelusuran Guna memperoleh jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah di atas, penulis

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Whitney,²⁰ penelitian deskriptif ialah penelitian tentang fakta dengan interpretasi yang tepat bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki.

2. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini mendasarkan pada data sekunder, yaitu data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat autentik. Karena sudah di peroleh dari tangan ke dua, ketiga, dan seterusnya. Melihat dari uraian itu maka yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen, buku-buku, teks, jurnal ilmiah, arsip-arsip atau berita-berita di surat kabar majalah dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai data sekunder, dengan demikian penelitian ini mebggunakan teknik dokumentasi melalui studi kepustakaan (library research). Sesuai dengan penggunaan data sekunder, maka pencarian data penelitian dari penulisan ini di fokuskan pada data-data pustaka, yaitu dengan mengumpulkan, menyeleksi, menganalisis bahan-bahan pustaka yang ada hubungannya dengan penelitian ini, seperti buku-buku teks, jurnal ilmiah, majalah dan sebagainya.

²⁰ Whitney, ... "Method of Research", Ghelie Indonesian, Jakarta, 1998.

4. Teknik Analisa Data

Data yang di peroleh dari penelitian ini akan di susun secara sistematis dan logis kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif. Bogda dan Taylor²¹ berpendapat penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari skripsi ini akan dibuat menurut jalur/urutan sebagai berikut :

BAB I :

Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari :

- a. Alasan Pemilihan Judul.
- b. Latar Belakang Masalah.
- c. Pokok Permasalahan.
- d. Batasan Permasalahan.
- e. Kerangka Teori.
- f. Hipotesa
- g. Metode pengumpulan data.
- h. Sistematika Penulisan

BAB II :

Bab ini akan dibuat berdasarkan sistematika berikut :

a. Pendahuluan

Berisi ulasan mengenai alur perdebatan dalam sejarah studi hubungan internasional. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai beberapa pandangan mengenai kekuasaan berdasarkan paradigma realisme dan neoliberalisme. Sub bab dari bab ini akan dibagi berdasarkan beberapa hal tersebut yaitu :

b. Realisme

Sub bab ini akan mencoba mengurai argumentasi mengenai kekuasaan yang ada dalam dunia internasional berdasarkan paradigma Realisme. Sub bab ini dengan demikian akan merangkum konsepsi kekuasaan realis mulai dari asumsi dasar realis tentang sifat kekuasaan, aktor dan sistem internasional, pemaknaan terhadap kekuasaan sampai dengan perimbangan kekuasaan sebagai antitesa realisme atas keadaan konflik.

c. Liberalisme

Dalam sub bab ini akan diuraikan pandangan kaum liberal mengenai kekuasaan yang ada dalam dunia internasional. Konsep-konsep liberalisme yang terkait erat dengan kekuasaan akan diulas agar diperkuatkan gambaran mengenai kekuasaan dalam paradigma liberal

d. Gambaran umum Konsep Kekuasaan Kontemporer

Setelah menguraikan gagasan-gagasan Realis dan dilanjutkan dengan Gagasan liberal, dalam sub bab ini penulis akan mengambil perdebatan paling aktual yaitu perdebatan antara neorealisme dan neoliberalisme. Selanjutnya penulis akan menambahkan tentang arkeologi dan genealogi yang menjadi landasan mengapa konsep kekuasaan kontemporer perlu untuk dipertanyakan. Dengan demikian, sebuah pemahaman baru akan kekuasaan dapat diketengahkan.

BAB III :

Konsep Kuasa Foucault :

Dari Kompleksitas Pemikiran ke Hubungan Internasional

Uraian yang terdapat dalam bab II adalah beberapa paradigma SHI yang oleh penulis patut untuk diberikan sebuah diskursus baru. Dalam Bab inilah, sebuah alternatif pandangan baru akan aspek-aspek tersebut akan diuraikan. Dengan demikian, bab ini akan sedikit mengulas tentang sejarah hidup dan pemikiran dari Michel Foucault. Selanjutnya, penulis akan mencoba untuk mengkontekstualisasikan gagasannya dalam menganalisa fenomena internasional dewasa ini. Oleh karena itu, Bab ini akan terdiri dari sub bab sebagai berikut :

A. Michel Foucault ; Riwayat, Pemikiran dan Karyanya :

Sub bab ini Akan mengupas riwayat hidup Foucault,

Pemikiran, dan ulasan terhadap beberapa Karyanya

B. Kritik Arkeologi dan Genealogi Kekuasaan Kontemporer:

Bab ini akan menguraikan kritik arkeologi dan Genealogi terhadap konsep kekuasaan konvensional yang hanya menekankan pada kekuasaan sebagai milik.

C. Konsep Kekuasaan Foucault :

Dalam sub bab ini, penulis menguraikan bagaimana pergeseran karakteristik kekuasaan strategi kekuasaan sebagai faktor independen yang membentuk pola interaksi dalam politik internasional.

D. Studi Kasus Kekuasaan dalam Perspektif Foucault.

Sub bab ini akan membahas beberapa kasus dalam politik internasional yang menggambarkan relevansi dari konsep kekuasaan dalam perspektif Foucault.

BAB IV :

Kesimpulan

Bab ini akan berisikan kesimpulan, yaitu point-point penting yang dapat dijadikan acuan dalam memahami konsep Kekuasaan dalam

Hubungan Internasional Kontemporer